



ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AUDIT

Benna Andriyani, Herry Laksito¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to observe the relationship between the ownership structure of the company, namely managerial ownership, foreign ownership, and government ownership as an independent variables to the audit fee agreed by the external auditor. Furthermore, the audit fee illustrate how the client's internal control level was going and the agency conflict that may occur.

The type of data used in this study is secondary data and involves 173 public companies in Indonesia. The sampling method in this research uses purposive sampling technique for the company that has been listed in Indonesia Stock Exchange which publishes annual report in 2015 and discloses voluntary information about audit fee and the composition of share ownership of company. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with OLS model.

This study uses agency theory to formulate three hypotheses that lead to the results of the analysis. The results showed a significant positive effect between the foreign and government ownership structure on the audit fee. While managerial ownership is negatively but not significant.

Keywords: ownership structure, audit fee, managerial ownership, foreign ownership, government ownership.

PENDAHULUAN

Kebutuhan terhadap kualitas audit dan pelaporan keuangan yang baik mulai ditekankan sejak terkuaknya skandal akuntansi beberapa perusahaan besar seperti Enron dan Arthur Anderson. Mustapha dan Ahmad (2011), serta Abdul Wahab *et al.*, (2011) berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab utama terjadinya skandal akuntansi tersebut adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang tidak berfungsi dengan baik. Demikian, berbagai mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal telah disarankan untuk mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan melibatkan peran auditor eksternal. Kehadiran auditor eksternal merupakan representasi dari peran pemegang saham untuk mengawasi aktivitas manajemen agar benar-benar menjalankan mekanisme tata kelola dengan baik sehingga konflik agensi menurun dan kesejahteraan pemegang saham akan terjamin secara maksimal.

¹ Corresponding author

Di Indonesia, emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan dimana di dalamnya memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal sejak tahun 2006 lalu sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP-134/BL/2006. Pada akhir penugasannya, auditor eksternal dengan perusahaan terkait kemudian menyepakati biaya audit atas laporan keuangan mengacu pada SK Ketua Umum IAPI No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit. Beberapa acuan untuk menentukan besarnya biaya audit adalah; (1) keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan berkaitan dengan tingkat urgensi dan kompleksitas perusahaan; (2) tingkat keahlian dan pengalaman dari staf yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan; (3) waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh staf; (4) basis penetapan fee yang disepakati. Selain hal-hal yang dijadikan pertimbangan diatas, struktur kepemilikan perusahaan diyakini memiliki pengaruh terhadap tingkat biaya audit yang dibayarkan klien kepada auditor eksternal (Nelson dan Mohamed-Rusdi, 2015; Sori dan Mohamad, 2009; Abbott *et al.*, 2003).

Tidak bisa dihindari bahwa struktur kepemilikan yang berbeda akan berpengaruh pada aktivitas manajemen dalam perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemisahan kontrol antara manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam hal kepemilikan perusahaan yang didistribusikan secara luas atau kepemilikan saham yang tersebar, kendali perusahaan terletak di tangan manajer sebagai pihak yang mengoperasikan perusahaan dalam kesehariannya. Selanjutnya, masalah keagenan muncul ketika manajer memiliki kesempatan untuk bertindak ke arah pemenuhan kepentingan yang bersifat pribadi dan memanipulasi hasil keuangan untuk alasan oportunistik diatas kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Meskipun pemegang saham terlibat dalam pemilihan dewan direksi perusahaan, tetapi kekuatan untuk fungsi kendali secara demokratis sangat kecil mengingat kepemilikan perusahaan yang rendah. Demikian, perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar cenderung membayar biaya audit yang tinggi, begitu sebaliknya pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi.

Penelitian ini mencoba untuk mengamati pengaruh struktur kepemilikan perusahaan sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan terhadap biaya audit. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan pada tingkat kepemilikan tertentu dan konflik agensi yang terjadi. Kebanyakan penelitian dilakukan di beberapa negara maju, seperti Niemi (2005), Mitra *et al.*, (2007) di Amerika Serikat dan Adelopo *et al.*, (2012). Sementara penelitian di kawasan negara berkembang khususnya Asia masih cenderung rendah. Di Indonesia, penelitian serupa dilakukan oleh Oktorina dan Wedari (2015) yang menginvestigasi karakteristik kepemilikan perusahaan, aktivitas komite audit, dan biaya audit. Sebagian penelitian menekankan pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan biaya audit. Demikian keterbatasan penelitian dan hasil yang tidak konsisten di beberapa negara menjadi alasan untuk meneliti topik struktur kepemilikan dan biaya audit. Selain itu, penelitian ini juga didorong oleh adanya perubahan pedoman tentang tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 (revisi) dan roadmap tata kelola perusahaan Indonesia yang dikeluarkan OJK pada tahun 2014 lalu. Perubahan pedoman tersebut diyakini berpengaruh pada struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga fungsi pengawasan dan biaya audit juga berubah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori agensi telah menjadi teori yang menarik dalam penelitian seputar audit eksternal karena mampu menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemilik sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks. Dalam teori keagenan, kehadiran mekanisme tata kelola akan meningkatkan fungsi kendali dan pemantauan terhadap kinerja manajemen sehingga mampu mengurangi timbulnya kesalahan dalam pelaporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan teori agensi sebagai kerangka utama untuk menjelaskan suatu permasalahan, beberapa penelitian sebelumnya menggunakan biaya audit sebagai proksi untuk mengukur biaya agensi (Mustapha dan Ahmad, 2011), konflik agensi (Dey, 2008), dan kualitas audit (Salleh dan Manson, 2006). Hal ini membuktikan bahwa biaya audit mampu menjelaskan hubungan agensi dalam perusahaan karena adanya pemisahan struktur kepemilikan. Semakin rendah konflik agensi, maka kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen menjadi selaras sehingga biaya agensi atau biaya audit diharapkan menjadi rendah, dan sebaliknya.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Biaya Audit

Kepemilikan manajerial yang tinggi dalam suatu perusahaan diyakini mampu menekan biaya agensi atau biaya audit. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergeseran kepentingan oleh pihak agen perusahaan. Pihak-pihak manajerial yang semula berkedudukan sebagai agen, ketika diberikan kepemilikan saham maka fungsinya tidak lagi hanya sebagai agen tetapi juga sebagai pemilik perusahaan atau principal. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Fleming *et al.*, (2005) yang menyebutkan bahwa manajer didorong memiliki saham untuk memotivasi pemantauan manajemen. Semakin tinggi porsi saham yang dimiliki, tanggung jawab terhadap kesejahteraan pemegang saham termasuk didalamnya adalah dirinya sendiri juga meningkat. Demikian konflik agensi dalam perusahaan menjadi rendah karena adanya penyesuaian kepentingan antara agen dan principal untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

Sejalan dengan pemaparan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Mustapha dan Ahmad (2011) di Malaysia menemukan adanya hubungan berkebalikan antara kepemilikan manajerial dan total biaya pengawasan seperti yang telah diprediksi dalam teori keagenan. Hal ini berarti bahwa total biaya pengawasan kaitannya dengan biaya audit akan lebih rendah pada tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi karena kebutuhan kerja audit seperti pengujian substantif rendah. Demikian biaya audit disepakati pada tingkat yang rendah. Dengan mempertimbangkan teori keagenan dan tingkat mekanisme kontrol perusahaan, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya audit.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Biaya Audit

Menurut Baldacchino *et al.*, (2014), perusahaan milik asing cenderung melihat layanan audit secara lebih kompleks. Dibandingkan hanya melihatnya sebagai suatu kewajiban, mereka menganggap bahwa laporan keuangan yang telah diaudit merupakan validitas dari kinerja perusahaan. Dengan begitu, investor asing akan menekankan supaya prosedur audit dilakukan secara lebih rinci dan menyeluruh sehingga biaya audit meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh Zureigat (2011) yang menyebutkan bahwa peningkatan biaya audit pada perusahaan multinasional disebabkan karena investor asing

cenderung menuntut kualitas audit yang tinggi. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, beberapa perusahaan asing cenderung menggunakan jasa auditor eksternal sekelas Big-4 yang terkenal menyepakati biaya audit yang lebih tinggi dibanding auditor eksternal lokal.

Selain itu, kepemilikan asing merupakan struktur kepemilikan yang tersebar karena pemilik sahamnya berasal dari berbagai negara di belahan dunia dengan latar belakang dan kepentingan yang juga bermacam-macam. Keberagaman tersebut akan memberikan pengaruh pada fungsi pengendalian terhadap aktivitas manajemen di perusahaan Indonesia. Demikian dengan adanya banyak kepentingan, maka biaya audit akan tinggi sejalan dengan meningkatnya konflik agensi antarpemegang saham. Hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2. Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap biaya audit.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Biaya Audit

Denis dan Mcconnell (2003) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah merupakan hibrida yang menarik antara kepemilikan yang tersebar dan terkonsentrasi. Perusahaan negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh rakyat yang mengacu pada kepentingan publik secara teoritis, tetapi fungsi pengendalian berdasarkan aturan hukum berada di tangan birokrat. Meski demikian, birokrasi tidak memiliki hak aliran kas secara signifikan karena sejatinya arus kas perusahaan negara dimiliki secara tersebar oleh rakyat yang membayar pajak negara. Berdasarkan konsep ini, pemegang saham pada perusahaan negara didominasi oleh rakyat sehingga aktivitas birokrasi dalam perusahaan seharusnya diarahkan untuk kesejahteraan sosial. Kenyataannya, birokrat cenderung memiliki tujuan yang bertolak belakang dengan kesejahteraan sosial karena didasari oleh adanya kepentingan politik (Shapiro dan Willig, 1990; Shleifer dan Vishny, 1994).

Seperti di beberapa negara berkembang lainnya, di Indonesia kemudian muncul kebijakan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan adanya kebijakan tersebut maka saham di perusahaan negara dapat dimiliki oleh pihak asing maupun swasta. Jika dikaitkan dengan perspektif tata kelola perusahaan, kebijakan tersebut kurang efisien untuk meningkatkan nilai perusahaan karena kepemilikan saham yang semakin tersebar tidak hanya publik tetapi juga pihak swasta dan asing. Beberapa perusahaan negara di Indonesia bahkan memiliki persentase saham asing yang cukup tinggi. Kondisi ini kemudian menyebabkan tingginya konflik agensi. Akhirnya, hipotesis ketiga disimpulkan sebagai berikut:

H3. Struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap biaya audit.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen biaya audit dan didefinisikan secara operasional sebagai jumlah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor eksternal atas penyediaan jasa audit. Secara keseluruhan melibatkan tiga jenis struktur kepemilikan sebagai variabel independen dan lima variabel kontrol yang akan dirincikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel, Jenis, Indikator, dan Skala Pengukuran

Variabel	Jenis	Indikator
Biaya Audit	Dependen	Logaritma natural biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal.
Kepemilikan Manajerial	Independen	Total persentase saham yang dimiliki oleh pengurus pelaksana dalam perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kepemilikan Asing	Independen	Total persentase saham yang dimiliki oleh individu dan non-individu asing.
Kepemilikan Pemerintah	Independen	Total persentase saham yang dimiliki negara maupun badan dalam pemerintahan.
Firma Audit	Kontrol	1 untuk penggunaan firma audit Big4 0 untuk penggunaan firma audit non-Big4
Leverage	Kontrol	Rasio total utang terhadap total aset
Kompleksitas	Kontrol	Rasio persediaan dan piutang terhadap total aset
Risiko	Kontrol	Rasio aset lancar dan utang lancar terhadap total aset
Profitabilitas	Kontrol	Rasio laba sebelum pajak terhadap total aset

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015, kecuali perusahaan industri keuangan. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan jumlah sampel dengan kriteria sebagai berikut; (1) perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015; (2) perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan periode tahun 2015; dan (3) perusahaan yang mengungkapkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian secara lengkap, diantaranya informasi biaya audit eksternal dan informasi kepemilikan saham perusahaan.

Metode Analisis dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square Regression* (Regresi OLS) untuk pengujian hipotesis. Model regresi OLS yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$LNAFEE = \alpha + \beta_1 (MOWN) + \beta_2 (FOWN) + \beta_3 (GOWN) + \sum_k^n Control + \varepsilon$$

Keterangan:

LNAFEE	=	Biaya audit dalam logaritma natural
MOWN	=	Kepemilikan saham manajerial
FOWN	=	Kepemilikan saham asing
GOWN	=	Kepemilikan saham pemerintah
	=	Konstanta
1- 3	=	Koefisien
	=	Residu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, bukan termasuk perusahaan industri keuangan. Sedangkan sampel penelitian merupakan perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan biaya audit dalam laporan tahunannya. Rincian perolehan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sampel Penelitian Periode 2013-2015

Kriteria Sampel	Total
Perusahaan Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2015	533
Perusahaan industri keuangan tahun 2015	(92)
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan tahun 2015	(19)
Perusahaan yang tidak mengungkapkan biaya audit eksternal	(224)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data penelitian	(25)
Perusahaan terpilih menjadi sampel	173

Sumber: Data sekunder yang di

Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
AFEE	173	46.750.000	37.840.000.000	1.437.752.919,08	3.305.756.155,46
MOWN	173	0	88,15	10,14	19,58
FOWN	173	0	98,59	26,73	27,17
GOWN	173	0	90,03	7,57	20,52
BIG4	173	0	1	0,43	0,49
LEV	173	0	87,22	24,68	19,04
INVREC	173	0	0,80	0,26	0,19
CRATIO	173	0,04	1,69	0,74	0,35
ROA	173	-24,18	38,91	3,07	8,39
Valid N (listwise)	173				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Variabel Struktur Kepemilikan

Struktur Kepemilikan	Jumlah	Persentase
MOWN = 0 (kurang dari 0,6%)	87	50,3%
MOWN = 1 (lebih dari 0,6%)	86	49,7%
Total	173	100%
FOWN = 0 (kurang dari 16%)	88	50,9%
FOWN = 1 (lebih dari 16%)	85	49,1%
Total	173	100%
GOWN = 0 (0%)	148	85,5%
GOWN = 1 (lebih dari 0%)	25	14,5%
Total	173	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 4.4
Independent Sample t-Test

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	F-test (p-value)	t-Test p-value
AFEE				
MOWN = 0	2.013.100.229,89	4.511.448.732,49	9,231	0,021*
MOWN = 1	855.715.523,26	915.965.281,93	(0,003)	
AFEE				
FOWN = 0	1.188.019.375,00	4.026.850.946,96	0,267	0,310
FOWN = 1	1.696.300.588,24	2.334.265.547,77	(0,606)	
AFEE				
GOWN = 0	1.057.443.175,68	1.177.050.599,88	39,224	0,000*
GOWN = 1	3.689.186.600,00	7.978.693.813,125	(0,000)	

Keterangan: *signifikan pada tingkat 5%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik t

	Beta	Sig.	F	Sig.	Adj. R ²
Model					
(Constant)	19,174	0,000	25,692	0,000 ^b	0,535
MOWN	-0,001	0,711			
FOWN	0,008	0,003			
GOWN	0,010	0,002			
BIG4	1,248	0,000			
LEV	0,015	0,000			
INVREC	-1,602	0,000			
CRATIO	0,446	0,072			
ROA	0,025	0,003			

Keterangan: *signifikan pada tingkat 5%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, asing, dan pemerintah memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian, model regresi dalam penelitian ini menjelaskan sebesar 53,5% biaya audit mampu dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol, sedangkan 46,5% lainnya dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

MOWN merupakan representasi hipotesis pertama (H1) yang menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan manajerial dengan biaya audit. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyebutkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka biaya audit akan semakin rendah. Berdasarkan pada tabel 4.12 diatas, kepemilikan manajerial (MOWN) memiliki nilai koefisien -0,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,711. Tanda negatif pada nilai koefisien mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial (MOWN) dengan biaya audit tetapi pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat 5 persen ($\text{sig} > 5\%$). Dengan begitu, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan ditolak.

Selanjutnya, variabel FOWN menandai besarnya kepemilikan asing dalam suatu perusahaan. Disebutkan pada hipotesis kedua bahwa semakin tinggi kepemilikan asing, maka semakin tinggi pula biaya audit yang disepakati. Nilai koefisien pada pengujian kepemilikan asing (FOWN) adalah 0,008 dengan signifikansi 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan asing

(FOWN) dengan biaya audit pada $\alpha = 5\%$ karena nilai signifikansi tidak lebih dari $(\text{sig} < 5\%)$. Keduanya juga menunjukkan arah hubungan positif yang berarti bahwa ketika suatu perusahaan didominasi oleh pemegang saham asing, maka biaya audit yang disepakati juga tinggi. Demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa biaya audit akan lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki pemerintah (GOWN) dan sebaliknya. Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa variabel GOWN memiliki signifikansi 0,002 pada tingkat $\alpha = 5\%$. Sedangkan koefisien regresinya sebesar 0,010. Hasil tersebut berarti bahwa antara kepemilikan pemerintah (GOWN) dengan biaya audit memiliki hubungan signifikan ($\text{sig} < 5\%$) yang positif. Demikian, sesuai dengan perumusan hipotesis maka kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap biaya audit sehingga hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima.

Dari kelima variabel kontrol (BIG4, LEV, INVREC, CRATIO, dan ROA), satu diantaranya yaitu CRATIO sebagai proksi dari risiko bisnis klien memiliki koefisien regresi sebesar 0,446 dengan signifikansi 0,072 ($\text{sig} > 0,05$) yang berarti bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit. Sedangkan BIG4, LEV dan ROA memiliki hubungan yang signifikan ($\text{sig} < 0,05$) positif dengan nilai koefisien masing-masing adalah 1,248 0,023 dan 0,051. Terakhir, pengaruh terhadap biaya audit secara negatif ditunjukkan oleh variabel kontrol INVREC sebagai proksi kompleksitas bisnis klien dengan nilai koefisien sebesar -1,602 dan signifikan 0,000 pada $\alpha = 5\%$.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal. Secara umum, perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menyepakati biaya audit yang rendah, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil pengujian regresi, berikut temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini:

1. Struktur kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif terhadap biaya audit, tetapi tidak signifikan. Argumen yang mungkin mampu menjelaskan hubungan insignifikan tersebut, menurut Ben Ali dan Lesage (2013) adalah adanya dua efek berlawanan yaitu *alignment effect* (efek penyelarasan) dan *entrenchment effect* (efek kubu) pada perusahaan keluarga yang kepemilikan sahamnya didominasi pihak manajerial seperti dikemukakan oleh Chau dan Leung (2006). Hubungan antara biaya audit dengan kepemilikan keluarga atau manajerial tergantung pada trade-off dua konflik tersebut.
2. Struktur kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit. Artinya, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak asing maka semakin tinggi pula biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal. Secara teoritis, tingginya biaya audit pada perusahaan asing dikarenakan kompleksitas bisnis dan adanya tuntutan untuk menyajikan kualitas audit yang tinggi. Zureigat (2011) menemukan adanya kecenderungan dalam penggunaan jasa auditor eksternal terkemuka sejenis Big-4 pada perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi. Disamping itu, Niemi (2005) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa auditor eksternal pada perusahaan afiliasi asing menghabiskan waktu yang lama untuk melakukan prosedur audit.

3. Struktur kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap biaya audit. Fungsi pengendalian dalam kepemilikan pemerintah tidak diimbangi dengan adanya hak alir kas atas kepemilikan saham langsung (La Porta *et al.*, 1998) sehingga pengawasan oleh birokrasi terhadap aktivitas manajemen menjadi bias apakah mereka bertindak untuk pemerintah, dirinya sendiri, atau rakyat atas nama kesejahteraan sosial. Birokrasi hanya diberikan imbalan berupa insentif. Selain itu, dari hasil pengujian *Independent Samples Test* disimpulkan bahwa rata-rata biaya audit yang tinggi disepakati oleh perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi dan sebaliknya

Penelitian ini melibatkan seluruh perusahaan terdaftar di BEI pada tahun 2015 yang mengungkapkan informasi biaya audit dalam laporan tahunannya, kecuali perusahaan industri keuangan. Total sampel yang digunakan adalah 173 perusahaan. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa kemampuan model untuk menjelaskan pengaruh variabel struktur kepemilikan terhadap biaya audit adalah sebesar 53,5%. Meski demikian, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pengungkapan informasi biaya audit dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).
2. Pengungkapan informasi tentang struktur kepemilikan dan biaya audit disajikan dalam bentuk yang berbeda pada masing-masing perusahaan, tidak ada aturan baku tertentu.
3. Penelitian hanya menggunakan satu tahun periode penelitian, yang mana terdiri dari sampel perusahaan publik pada tahun 2015. Penelitian kedepannya diharapkan untuk menambahkan periode penelitian dan variabel lain yang diperlukan.



REFERENSI

- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F., & Raghunandan, K. (2003). The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees, 22(2), 17–32.
- Abdul Wahab, E. A., Zain, M. M., & James, K. (2011). Political Connections, Corporate Governance and Audit Fees in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.1108/02686901111129562>
- Adelopo, I., Jallow, K., & Scott, P. (2012). Multiple Large Ownership Structure, Audit Committee Activity and Audit Fees: Evidence from The UK. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 100–121. <https://doi.org/10.1108/09675421211254821>
- Baldacchino, P. J., Attard, M., & Cassar, F. (2014). Factors Influencing External Audit Fees in Malta. *Bank of Valletta Review*, (48), 26–40.
- Ben Ali, C., & Lesage, C. (2013). Audit Pricing and Nature of Controlling Shareholders: Evidence from France. *China Journal of Accounting Research*, 6(1), 21–34. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.08.002>
- Chau, G., & Leung, P. (2006). The Impact of Board Composition and Family Ownership on Audit Committee Formation: Evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.01.001>
- Denis, D. K., & Mcconnell, J. J. (2003). International Corporate Governance. *Journal of Financial and Qualitative Analysis*, 38(1), 1–36.
- Dey, A. (2008). Corporate Governance and Agency Conflicts. *Journal of Accounting Research*, 46(5), 1143–1181. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00301.x>
- Fleming, G., Heaney, R., & McCosker, R. (2005). Agency Costs and Ownership Structure in Australia. *Pacific Basin Finance Journal*, 13(1), 29–52. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2004.04.001>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1998). Corporate Ownership Around The World. *National Bureau of Economic Research*, 6625.
- Mazlina Mustapha, & Ayoib Che Ahmad. (2011). Agency Theory and Managerial Ownership: Evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 26(5), 419–436.
- Mitra, S., Hossain, M., & Deis, D. R. (2007). The Empirical Relationship between Ownership Characteristics and Audit Fees. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 28(3), 257–285. <https://doi.org/10.1007/s11156-006-0014-7>
- Nelson, S. P., & Mohamed-Rusdi, N. F. (2015). Journal of Accounting in Emerging Economies Article information : *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 5, 457–478.
- Niemi, L. (2005). Audit Effort and Fees Under Concentrated Client Ownership: Evidence from Four International Audit Firms. *International Journal of Accounting*, 40(4), 303–323. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2005.09.006>
- Oktorina, M., & Wedari, L. K. (2015). An Empirical Investigation on Ownership Characteristics, Activities of the Audit Committee, and Audit Fees in Companies Listed on Indonesia Stock Exchange. *Applied Finance and Accounting*, 1(1), 20–29. <https://doi.org/10.11114/afa.v1i1.639>
- Salleh, Z., & Manson, S. (2006). The Impact of Board Composition and Ethnicity on Audit Quality: Evidence from Malaysia Companies. *Malaysian Accounting Review*, 5(2), 61–83.
- Shapiro, C., & Willig, R. D. (1990). *Economic Rationales for The Scope of Privatization*.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Politicians and Firms. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(4), 995–1025. <https://doi.org/10.2307/2118354>
- Sori, Z. M., & Mohamad, S. (2009). Governance Structure and External Audit Price: Evidence from an Emerging Economy. *International Journal of Economics and Management*, 2(2), 259–279.
- Zureigat, Q. (2011). The Effect of Ownership Structure on Audit Quality: Evidence from Jordan. *International Journal of Business and Social Science*, 2(10), 38–46.

